KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 4 9 6			H.4 X	Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 7 3 6 4 1 8 0 0 5 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : YENNY							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4 2	1-402-01	5.000.000	5.000.000	0	5	250.000	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
C.1 NPWP Instansi Pem C.2 Nama Instansi Peme C.3 ID Subunit Organisa C.4 Tanggal C.5 Nama Penandatanga C.6 Pernyataan Wajib Pa	erintah : si : :	RUMAH SAKIT JIWA DAE 2 6 dd 0 4 mm RIANDY	1 6 2 7 2 2 RAH ATMA HUSADA MAHAK				
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperi	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	t mengatur bahwa do	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

SEOLGHEG